



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Nomor : 462-2942
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Riwayat Penggunaan Tanah Dalam Pemberian Izin Lokasi.

Jakarta, 14 Oktober 1996
Kepada Yth.
1. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi.
2. Kepala Kantor Pertanahan
Kantor Kabupaten/Kotamadya
di-
seluruh Indonesia.

Sebagai usaha untuk mencegah dan memperketat pengawasan adanya usaha merubah tanah sawah beririgasi menjadi peruntukkan lain dalam kegiatan pembangunan, maka dalam pemberian Izin Lokasi perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam Proses pemberian Izin Lokasi agar memperhatikan riwayat penggunaan tanahnya. Hal ini untuk mengetahui/mendeteksi kemungkinan adanya unsur kesengajaan merubah fungsi sawah beririgasi sebelum diajukan permohonan izin lokasi dengan maksud untuk menghindari ketentuan larangan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan lain dalam kegiatan pembangunan.
2. Dalam teknis pelaksanaannya data riwayat penggunaan tanah tersebut di atas dipersiapkan oleh Kepala Seksi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan setempat.
3. Data riwayat penggunaan tanah tersebut agar disampaikan dan dibahas pada rapat koordinasi Izin Lokasi. Apabila dari data riwayat penggunaan tanah menunjukkan pernah digunakan sebagai sawah beririgasi maka perlu diadakan penelitian bersama dengan instansi terkait.
4. Apabila hasil evaluasi dari instansi terkait tersebut menyimpulkan bahwa adanya kesengajaan untuk merubah atau menghilangkan fungsi tanah sawah beririgasi tersebut maka Izin Lokasi agar ditolak dan tanah tersebut agar dikembalikan fungsinya sebagai sawah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Ttd

IR. SONI HARSONO

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Presiden R.I. sebagai laporan.
2. Yth. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bapennas, selaku ketua BKTRN.
3. Yth. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia.
4. Yth. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II seluruh Indonesia.